

PERSEPSI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN TNGM

Dwi Retnowati Narsuka, Sujali

retnarsuka@yahoo.com

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Bakti Setiawan

Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

INTISARI

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan Gunung Merapi adalah dengan melalui pembentukan sebagai taman nasional yang berfungsi lengkap meliputi fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) sebagian besar merupakan masyarakat petani dan peternak yang mempunyai ketergantungan akan sumber daya hutan yang mempengaruhi persepsi masyarakat akan keberadaan taman nasional. Pengelolaan taman nasional memerlukan peranserta masyarakat dimana telah terdapat keterikatan yang kuat dalam hubungan sosial budaya dan ekonomi antara masyarakat dan keberadaan hutan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan mengetahui 1) tingkat pengetahuan masyarakat tentang TNGM, 2) persepsi masyarakat tentang TNGM 3) peranserta masyarakat dalam pengelolaan TNGM serta 4) mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, tingkat ekonomi serta jarak tempat tinggal dengan batas TNGM terhadap persepsi dan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan TNGM. Subyek penelitian ini adalah 120 Kepala Keluarga di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pengambilan sampel secara *systematic random sampling*. Kuesioner dipakai sebagai alat bantu untuk mengukur tingkat pengetahuan, tingkat ekonomi, tingkat persepsi dan tingkat peranserta. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis uji korelasi variabel-variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan TNGM, 44,2% dari responden dalam kategori sedang dan 48,3% dari responden dalam kategori tinggi. Apabila dirinci dalam 3 isu utama pengetahuan maka pengetahuan masyarakat mengenai status dan manfaat mayoritas dalam kategori sedang (50%), pengetahuan mengenai kondisi TNGM mayoritas tinggi (56,7%) dan mengenai pengelolaan mayoritas tinggi (54,2%). Tingkat persepsi masyarakat mengenai pengelolaan TNGM (dirinci dalam tiga isu utama: mengenai status dan manfaat, kondisi TNGM dan pengelolaan TNGM) dalam kategori sedang atau cukup positif (74,2%). Analisis persepsi menunjukkan tingkat pengetahuan berpengaruh positif terhadap persepsi masyarakat ($r=0,406$, $p=0,000$, $p<0,05$). Peranserta masyarakat dalam pengelolaan TNGM, mayoritas dalam tingkat sedang (74,2%). Analisis peranserta menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ($r = 0,290$, $p=0,001$, $p<0,05$) dan jarak tempat tinggal dengan batas taman

nasional berpengaruh positif terhadap tingkat peranserta masyarakat ($r=0,193$, $p=0,035$, $p<0,05$).

Kata kunci: taman nasional, pengetahuan, persepsi, peranserta

ABSTRACT

The government policy in the forest area management is by forming the forest area of Mount Merapi as a National Park, being one of conservation areas with comprehensive functions, including the protection of life supporting system, the conservation of the diverse species and ecosystem, and the sustainability use of natural resources. The surrounding neighbourhood of Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) consists of farmers with their rice-fields and farms, having dependency to natural resources available in the TNGM. These dependency too contributes to the public perception on the existence of TNGM. The operation of TNGM should pay attention to residents' necessity as the conservation objective demands the participation of public living around the TNGM, who have close social, cultural, and economic relationship with the forest. The objectives of this research are to identify 1) the public's knowledge of the determination and management of TNGM (Mountain Merapi National Park), 2) the level of residents' perception on the management of TNGM, 3) identify the level residents' participation on the management of TNGM, and 4) the correlation between education level, knowledge level, economic level, and the distance between residence to the boundary of TNGM to the perception and participation level of TNGM management. The subject of this research consists of 120 households in Umbulharjo Village, Cangkringan Sub-district, Sleman Regency. The methodology used was the survey research-method with systematic-random sampling technique. Questionnaires were used as tools to record the family's economic capacity and to measure the level of knowledge, perception, and participation. The correlation between research variables was tested using descriptive analysis technique and correlation test. Results of this research show the category for knowledge level, 44,2% of population at average category and 48,3% of population at high category. Detailed into three aspects, the dominant level of public's knowledge was average on the status and advantages of TNGM (50%), high on the condition of TNGM (56.7%), and high on the management of TNGM (54.2%). Peoples's perception level about the management of national park (detailed in three main issues, the people's perception about the status and advantages of TNGM, the condition of TNGM and the management of TNGM) is in average category or adequately positive (74,2%). Perception analysis shows that knowledge level ($r = 0,406$, $p = 0.000$, $p<0,05$) give positive influence to the people's perception of TNGM. People's participation in the management of TNGM is majority in medium participation level (74.2%). Participation analysis shows that knowledge level ($r=0,290$, $p=0.001$, $p<0,05$), and distance between residence to the national park borders give positive influence to participation level ($r = -0,193$, $p=0.035$, $p<0.05$).

Key word: national park, knowledge, perception, participation

PENDAHULUAN

Taman Nasional merupakan salah satu bentuk pengelolaan kawasan konservasi yang berfungsi lengkap meliputi fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi merupakan kawasan lindung yang berada secara administratif di empat kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali, ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehutanan No: SK 134/MENHUT-II/2004 tanggal 4 Mei 2004. Pengelolaan suatu taman nasional tidak dapat terlepas dari kepentingan masyarakat di sekitar kawasan hutan dimana telah terdapat keterikatan yang kuat dalam hubungan sosial budaya dan ekonomi antara masyarakat dan keberadaan hutan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pengelolaan kawasan penyangga di luar kawasan dan zona pemanfaatan lainnya seharusnya memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan. Dengan kata lain, dalam upaya pelestarian lingkungan TNGM diperlukan peranserta masyarakat. Menurut (Harjasoemantri, 1988), pembangunan tidak dapat dilaksanakan tanpa peranserta masyarakat, untuk itu setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat berperanserta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup guna terwujudnya pembangunan.

Saat ini kondisi di beberapa tempat dalam kawasan hutan G. Merapi mengalami kerusakan selain bencana alam letusan juga aktivitas penambangan pasir dan batu yang tidak terkontrol. Aktivitas penambangan pasir liar di wilayah Sleman yang masuk kawasan TNGM ikut mempengaruhi kerusakan lahan terbuka. Luas kerusakan hutan terbuka milik TNGM baik karena aktivitas manusia dan bencana alam saat ini mencapai 290,78 ha, tersebar di empat kabupaten. Saat ini kondisi sumber air yang ada di dalam kawasan TNGM juga telah menurun debitnya, seperti di Umbul Wadon. Debit Umbul Wadon pernah mencapai 420 l/dt pada tahun 2001 berkurang menjadi 200 l/dt pada musim kemarau dan 265 l/dt pada tahun 2008 (sumber: Dinas P2BA Kabupaten Sleman) di kawasan Kalikuning, sedangkan Umbul Lanang sudah beberapa tahun ini tidak mengeluarkan sumber air. Menurut pendataan Tata Guna Air dalam Tanah Kabupaten Sleman tahun 2004, Umbul Lanang masih mengeluarkan air dengan debit 78 l/dt. Kondisi fauna yang ada di kawasan TNGM saat ini juga tidak sebanyak tahun 80-an, baik jumlah maupun jenisnya. Menurut beberapa penduduk kawasan Kalikuning dulu banyak dijumpai binatang liar seperti kijang, namun saat ini sudah tidak nampak lagi. Berdasarkan kondisi kawasan TNGM dan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan, maka penelitian ini akan menelaah bagaimana pengetahuan, persepsi dan peranserta masyarakat terhadap penetapan status dan pengelolaan lingkungan TNGM.

Pengertian hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan Umum Kehutanan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Konservasi dalam kawasan lindung (*protected areas*) merupakan salah satu prioritas kebijakan konservasi keanekaragaman hayati Pemerintah Indonesia seperti yang telah ditetapkan dalam *National Biodiversity Plan* (Bapenas, 1993). Berbagai kawasan lindung, baik dalam bentuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam maupun dalam bentuk lindung lainnya telah ditetapkan dengan dasar kebijakan yang makin terpadu khususnya sejak dekade 1990-an melalui UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang.

Kriteria Taman Nasional di Indonesia dimunculkan Direktorat PPA pada tahun 1977 sesuai kesepakatan *The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) tahun 1969. Definisi menurut kesepakatan tersebut, taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang luas, baik di darat maupun di laut, yang di dalamnya terdapat satu atau lebih ekosistem alam yang utuh tidak terganggu; di dalamnya terdapat jenis-jenis tumbuhan atau satwa beserta habitatnya, juga tempat-tempat yang secara geomorfologi bernilai untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi dan pariwisata, panorama alam yang menonjol, dimana masyarakatnya diperbolehkan masuk ke dalam kawasan untuk berbagai kepentingan tersebut.

Eksistensi masyarakat di dalam dan luarnya tidak dapat terlepas dari kawasan Taman Nasional karena pada kenyataannya masyarakat ini telah terlebih dulu tinggal di wilayah sekitar hutan yang dijadikan kawasan taman nasional tersebut. Selanjutnya, (Suharjito, 2003) menyatakan bahwa masyarakat lokal adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan dan bergantung kepada hutan untuk memenuhi kehidupannya (ekonomi, politik, religius, dan lainnya).

Menurut (Ritohardoyo, 1995) bahwa persepsi adalah proses pemberian kesan, penilaian, merasakan, memahami, menghayati, menginterpretasi dan mengevaluasi hal berdasarkan informasi yang ditampilkan. Persepsi ini dapat memberikan motivasi tatanan perilaku bagi perseptor itu sendiri. Selanjutnya (Ritohardoyo, 1995) berpendapat persepsi mempunyai implikasi yang sangat penting dalam tatanan perilaku. Tatanan perilaku tersebut termasuk tatanan perilaku sosial yang mempengaruhi hidup dan kehidupan lingkungan sosial (*social system*) maupun lingkungan biogeofisik (*ecosystem*). Sebagai bagian dari sikap, persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting

(*significant others*), pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan atau lembaga agama, dan faktor emosional.

Peranserta masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok dalam masyarakat, untuk menyatakan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap keberlanjutan lingkungan, dimana mereka berada atau bergabung dalam rangka mencapai tujuan masyarakat yang mandiri. Menurut (Awang, 2003), indikator peranserta masyarakat yaitu: (1) Keterlibatan secara mental emosional, (2) Kesiediaan memberikan sumbangan dan dukungan dan (3) Kesiediaan secara mental dan emosional berupa ikut bertanggung jawab dalam pengawasan dan penanggulangan. Menurut (Mitchell, *et al*, 2000) menyertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya, melalui konsultasi dengan masyarakat yang tinggal di wilayah yang akan terkena kebijakan, program, atau proyek, dimungkinkan untuk (1) merumuskan persoalan dengan lebih efektif, (2) mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah, (3) merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial akan dapat diterima dan (4) membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian, sehingga memudahkan penerapan.

Penetapan suatu kawasan menjadi Taman Nasional merupakan perwujudan dari upaya perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (UU No 5 tahun 1990). Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan mengenai Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dilakukan upaya pemerintah dalam hal ini Balai TNGM bersama masyarakat Desa Umbulharjo secara kemitraan. Dalam pengelolaan Taman Nasional, peranserta atau partisipasi masyarakat memegang peranan sangat penting dan merupakan kunci utama akan keberhasilan penerapan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi. Persepsi masyarakat terhadap taman nasional akan mempengaruhi kemauan masyarakat untuk mengambil peran atau berpartisipasi terhadap upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem taman nasional. Kajian persepsi diharapkan dapat mengungkap lebih dalam dengan mengkaitkan variabel sosial ekonomi dan variabel tingkat pengetahuan. Persepsi masyarakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pemahaman, pandangan atau tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan kolaboratif TNGM. Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Kerangka pemikiran diatas mendasari kajian (1) tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya taman nasional dan pengelolaan TNGM; (2) Persepsi yang terbentuk dalam diri masyarakat tentang taman nasional dan pengelolaan TNGM (3)

Peranserta masyarakat dalam pengelolaan TNGM serta (4) Faktor-faktor pengaruh terhadap persepsi dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan TNGM.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang berada dalam zona penyangga kawasan TNGM dan dengan pertimbangan-pertimbangan: lokasi penelitian merupakan desa yang terletak di perbatasan langsung dengan batas terluar TNGM dan telah terdapat kesepakatan pengelolaan bersama antara Balai TNGM dengan Pemerintah Desa tentang Kemitraan Pengelolaan TNGM

Populasi penelitian ini adalah dari Kepala Keluarga (KK) di Desa Umbulharjo yang diambil sampel secara proporsional berdasarkan jumlah KK masing-masing dusun. Jumlah sampel yang diambil adalah 120 KK. Pengambilan sampel dusun dilakukan dengan menggunakan metode *area sampling*, yaitu dengan mengambil sampel berdasarkan lokasinya. Lokasi pengambilan sampel dibagi 3 yaitu dusun yang berjarak dekat atau berbatasan langsung dengan TNGM yaitu Dusun Pelemsari dan Pangukrejo. berjarak sedang yaitu Dusun Gondang (bagian bawah) dan Balong (1-2 km) dan berjarak jauh yaitu Dusun Plosokerep dan Karanggeneng (lebih dari 2 km). Responden adalah masyarakat atau penduduk yang terpilih dengan metode *systematic random sampling* juga informan kunci (*key person/informant*), yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi, keterangan dan petunjuk dalam pengumpulan data serta dapat memberikan keterangan secara luas tentang permasalahan yang diteliti.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah yang terkait dan studi pustaka hasil-hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel penelitian yang digunakan sebagai variabel terikat (*dependent variable*) adalah persepsi dan peranserta, variabel bebas (*independent variable*) adalah tingkat pengetahuan, pendidikan, tingkat ekonomi, dan jarak rumah tinggal. Data dianalisis dengan langkah (1) penyusunan tabel frekuensi dan (2) interpretasi dan analisis data. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan berdasarkan tabel uji silang atau *crosstab*, sedangkan untuk mencari hubungan dari variabel yang diujikan menggunakan uji statistik korelasi Spearman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Umbulharjo termasuk daerah dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi, mudah dijangkau baik dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Desa Umbulharjo terdiri dari 9 dusun (Dusun Pelemsari, Pangukrejo, Gondang, Gam-

bretan, Balong, Plosorejo, Karanggeneng, Plosokerep dan Pentingsari) dan terbagi dalam 18 RW dan 36 RT. Luas desa sekitar 832 ha, lahan bengkok 26,15 ha dan kas dukuh 7,6 ha.

Kondisi topografi wilayah penelitian berupa lereng dengan ketinggian 460 mdpl. Suhu/temperatur harian mencapai 24,60⁰ C. Jenis tanah di Desa Umbulharjo warna abu-abu, tekstur tanah pasiran, kedalaman kesuburan tanah sekitar 1,5 m dan cenderung asam. Penggunaan lahan didominasi oleh kebun dan tegalan seluas 386 ha, kemudian untuk permukiman 97 ha dan berupa semak belukar seluas 94 ha. Lahan pekarangan dan tegalan umumnya ditanami tanaman berkayu, buah-buahan dan rumput untuk pakan ternak. Hasil pertambangan di Desa Umbulharjo didominasi oleh tambang pasir dan batu/kerikil.

Kondisi terakhir jumlah penduduk di Desa Umbulharjo pada bulan April 2009 adalah sejumlah 4.342 jiwa, yang terdiri dari 2.172 jiwa penduduk laki-laki dan 2.170 jiwa penduduk perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Umbulharjo sejumlah 1.305 KK. Kepadatan penduduk pada tahun 2009 adalah 526 orang/km². Dalam kurun waktu 5 tahun, kepadatan tersebut naik 8,4% dibanding kepadatan penduduk pada tahun 2005, dimana kepadatan penduduk sebesar 485 orang/km².

Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Desa Umbulharjo, sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani yang tercatat pada tahun 2009 adalah 672 jiwa yang terdiri dari 624 jiwa petani laki-laki dan 30 jiwa petani perempuan.

Potensi wisata di Desa Umbulharjo selain wisata Kalikuning yang pengelolaannya ada di TNGM, juga mempunyai objek wisata bumi perkemahan dan sarana pendidikan alam kawasan pedesaan di Kinahrejo, Wonogondang, Senolewah di Dusun Pentingsari. Sejalan dengan perkembangan potensi wisata alam dan desa, di sepanjang jalan utama desa telah tumbuh banyak penginapan yang berjumlah kurang lebih 50 rumah penginapan yang tergabung dalam asosiasi pemilik penginapan.

Secara keseluruhan, pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan TNGM dalam penelitian ini dikategorikan dalam kategori rendah sejumlah 27 responden (7,5%), kategori sedang sebanyak 53 responden (44,2%) dan kategori baik 58 responden (48,3%).

Hasil kajian pengetahuan masyarakat tentang status dan manfaat Taman Nasional menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat dalam kategori sedang (50,0%). Pengetahuan masyarakat mengenai kondisi hutan di TNGM diharapkan akan memberikan implikasi yang positif terhadap pengelolaan lingkungan yang sebaiknya dilakukan oleh pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai kondisi TNGM, 68% responden mengetahui dengan baik meskipun pada umumnya masyarakat tidak pernah melihat secara langsung bagaimana kondisi di dalam taman nasional, mereka mengetahui informasi dari media, tokoh masyarakat maupun dari perbincangan antar warga.

Pengelolaan kawasan hutan G. Merapi saat ini di bawah Balai TNGM. Dalam pelaksanaan program-programnya, sudah seharusnya adanya keterlibatan masyarakat sekitar hutan maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Pengetahuan mengenai pengelolaan hutan, sebanyak 54% responden mengetahui dengan baik. Dalam penelitian ini, pertanyaan mengenai persepsi masyarakat terbagi dalam tiga aspek atau isu yaitu mengenai status taman nasional, kondisi taman nasional dan pengelolaan taman nasional yang telah dilakukan.

Persepsi masyarakat yang positif terhadap status G. Merapi saat ini merupakan faktor penting dalam pengelolaan kemitraan atau kolaboratif. Mayoritas persepsi masyarakat terhadap status dan manfaat taman nasional dalam penelitian ini dapat dikategorikan sedang, yaitu persepsi yang cukup baik. Sebanyak 80 responden termasuk dalam kategori sedang (67%). Hanya 3% dalam kategori rendah dan 31% dalam kategori tinggi.

Tabel 1. Pengetahuan Masyarakat tentang TNGM

Kategori	Pengetahuan							
	Status dan Manfaat		Kondisi		Pengelolaan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rendah	27	22.5	14	11.7	13	10.8	9	7.5
Sedang	60	50.0	38	31.7	42	35.0	53	44.2
Tinggi	33	27.5	68	56.7	65	54.2	58	48.3
	120	100.0	120	100.0	120	100.0	120	100.0

Sumber: Analisis Data Primer, 2009

Tabel 2. Persepsi Masyarakat tentang TNGM

Kategori	Persepsi							
	Status dan Manfaat		Kondisi		Pengelolaan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rendah	3	2.5	19	15.8	10	8.3	11	9.2
Sedang	80	66.7	69	57.5	100	83.3	89	74.2
Tinggi	37	30.8	32	26.7	10	8.3	20	16.7
	120	100.0	120	100.0	120	100.0	120	100.0

Sumber: Analisis Data Primer, 2009

Persepsi responden terhadap kondisi taman nasional saat ini cukup baik atau kategori sedang sebanyak 73,3%. Persepsi mengenai kondisi dan kerusakan taman nasional yang baik menggambarkan kesadaran mereka akan kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terhadap kerusakan yang dapat ditimbulkan.

Persepsi responden mengenai pengelolaan TNGM 89% dalam kategori tinggi atau baik, 8,3% kategori sedang dan 8,3% kategori rendah. Apabila melihat pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam penelitian, sebagian besar masyarakat memberikan apresiasi yang positif atau tinggi bahwa mereka setuju pengelolaan taman nasional dilakukan dengan aturan hukum yang jelas dalam mengatur atau membatasi pengambilan sumber daya (81%). Pengelolaan taman nasional seharusnya dilakukan dengan kerjasama sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan antara pemerintah, masyarakat dan swasta, 84% responden menyatakan setuju. Meskipun telah ada kerjasama kemitraan yang dilakukan antara pihak Balai TNGM dan masyarakat Desa Umbulharjo, ternyata pola kemitraan secara rinci tersebut kurang diketahui oleh masyarakat pada umumnya.

Secara teoritis, pendidikan akan mempengaruhi pandangan atau persepsi seseorang terhadap sesuatu masalah atau objek. Dengan membandingkan persepsi responden yang dikategorikan rendah, sedang dan tinggi dengan berbagai tingkat pendidikan, ternyata bahwa pendidikan tinggi yaitu akademi/ perguruan tinggi memiliki persepsi yang tinggi dan tidak ada responden yang persepinya rendah.

Sebaran tingkat persepsi yang relatif hampir tidak berbeda di setiap jenjang pendidikan, namun terdapat kecenderungan bahwa di pendidikan yang tinggi (PT), tidak ada responden yang persepinya rendah terhadap TNGM. Secara teoritis, tingkat pendidikan akan mempengaruhi pandangan atau persepsi seseorang terhadap suatu objek atau permasalahan. Demikian juga yang terjadi dalam masyarakat sekitar TNGM, persepsi responden dalam menerima dan memahami upaya pemerintah dalam melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.

Tabel 4 memperlihatkan dari tingkat pengetahuan responden yang rendah sebanyak 55,6% dari 9 responden memiliki persepsi sedang dan tidak ada responden yang mempunyai persepsi tinggi. Responden berpengetahuan sedang sebanyak 73,6% dari 53 responden memiliki persepsi sedang dan 77,6% dari responden dari 58 responden mempunyai pengetahuan yang tinggi. Hal itu berarti bahwa persepsi responden terhadap upaya pengelolaan taman nasional dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan. Meskipun demikian, dari tabel juga menggambarkan bahwa pengetahuan masyarakat yang tinggi tidak secara otomatis mempunyai persepsi yang tinggi pula, meskipun pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi.

Selanjutnya untuk membuktikan hipotesa pertama bahwa “Pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan TNGM berpengaruh positif terhadap persepsi”, dilakukan uji statistik yang hasilnya menunjukkan adanya hubungan antara variabel persepsi dengan pengetahuan. Diperoleh angka statistik r (koefisien korelasi) = 0,406 dengan probabilitas hitung = 0.000, yang berarti p hitung lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, menunjukkan adanya hubungan antara variabel yang diujikan.

Variasi persepsi masyarakat dalam pengelolaan TNGM di daerah penelitian ternyata tidak dipengaruhi oleh status atau tingkat sosial ekonominya. Hal tersebut ditunjukkan dari analisis tabel silang pada Tabel 5 memperlihatkan tingkat persepsi responden pada tingkat ekonomi rendah, sedang, dan tinggi.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa responden pada tingkatan ekonomi rendah dan sedang mempunyai tingkatan persepsi yang variasi persentase relatif sama, tidak terlihat menunjukkan ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan tingkat persepsi, meskipun dalam tingkat ekonomi tinggi tidak terdapat responden dengan persepsi rendah.

Tabel 3. Hubungan antara Pendidikan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan TNGM

Persepsi	Tingkat Pendidikan									
	Tidak sekolah	%	SD	%	SMP	%	SMA	%	Akademi /PT	%
Rendah	1	11,1	6	13,3	3	7,9	1	4,3	0	0,0
Sedang	6	66,7	35	77,8	27	71,1	17	73,9	4	17,4
Tinggi	2	22,2	4	8,9	8	21,1	5	21,7	1	4,3
	9	100,0	45	100,0	38	100,0	23	100,0	5	21,7

Sumber: Data Primer, 2009

Tabel 4. Hubungan Antara Pengetahuan dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan TNGM

Persepsi	Pengetahuan							
	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%	Jumlah	%
Rendah	4	44.4	6	11.3	1	1.7	11	9.2
Sedang	5	55.6	39	73.6	45	77.6	89	74.2
Tinggi	0	0.0	8	15.1	12	20.7	20	16.7
	9	100.0	53	100.0	58	100.0	120	100.0

Sumber: Data Primer, 2009

Jarak atau aksesibilitas secara fisik dalam beberapa hal dianggap akan mempengaruhi pengetahuan yang selanjutnya juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu kondisi lingkungan di suatu tempat. Jarak tempat tinggal dan batas TNGM adalah batas terluar TNGM yang berbatasan langsung dengan wilayah Desa Umbulharjo. Dalam tabel 6 terlihat dengan sebaran data yang relatif hampir sama sehingga diperoleh kecenderungan bahwa jarak tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang keterdapatan dan pengelolaan lingkungan TNGM.

Pengelolaan TNGM secara kelembagaan saat ini berada dalam wewenang tanggung jawab Balai TNGM. Visi yang diemban lembaga ini adalah: terwujudnya kelestarian kawasan TNGM sebagai penyangga kehidupan serta dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan sistem pengelolaan hutan, salah satu sistem pengelolaan sebuah taman nasional adalah kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan. Balai TNGM bersama dengan masyarakat Desa Umbulharjo telah menyepakati suatu kerjasama kemitraan dalam pengelolaan TNGM, sebagai perwujudan pengelolaan taman nasional secara kolaboratif.

Tabel 5. Hubungan Antara Tingkat Ekonomi dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan TNGM

Tingkat Persepsi	Tingkat Ekonomi						Jumlah	%
	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%		
Rendah	5	10,4	6	9,1	0	0,0	11	9,2
Sedang	39	81,2	47	71,2	3	50,0	89	74,2
Tinggi	4	8,3	13	19,7	3	50,0	20	16,7
Total	48	100,0	66	100,0	6	100,0	120	100

Sumber: Analisis Data Primer, 2009

Tabel 6. Hubungan Antara Jarak Rumah Tinggal – TNGM dengan Persepsi Masyarakat

Tingkat Persepsi	Jarak						Jumlah	%
	Dekat	%	Sedang	%	Jauh	%		
Rendah	4	11,1	3	6,8	4	10,0	11	9,2
Sedang	26	72,2	34	77,3	29	72,5	89	74,2
Tinggi	6	16,7	7	15,9	7	17,5	20	16,7
Total	36	100,0	44	100,0	40	100,0	120	100,0

Sumber: Data Primer, 2009

Dalam penelitian ini, peranserta masyarakat adalah bentuk dari peranserta responden dalam pengelolaan taman nasional seperti yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan bersifat umum, selain menyangkut tindakan nyata juga kesediaan mereka mengikuti kegiatan dan kemauan untuk ikut menjaga dan melaksanakan aturan-aturan yang disepakati bersama.

Tingkat peranserta dalam penelitian ini menunjukkan mayoritas responden dalam tingkat sedang yaitu sebanyak 89 responden atau 74,2%. Secara lebih lengkap sebaran responden berdasarkan kategori peranserta dalam Tabel 7. Pada tingkat pendidikan responden SMA, sebanyak 69,6% dari 23 responden pada tingkat peranserta yang sedang. Demikian juga pada responden dengan tingkat SD dan SMP, dominan dalam tingkat peranserta yang sedang yaitu 88,9% dari 9 responden dan 73,7% dari 38 responden. Sebaran data responden mengenai hubungan tingkat pendidikan dan peranserta masyarakat dalam penelitian ini menunjukkan sebaran yang hampir sama di setiap jenjang atau tingkat pendidikan yang mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan hampir tidak mempengaruhi tingkat peranserta masyarakat.

Dalam Tabel 9. dapat dilihat bahwa dalam tingkat pengetahuan rendah, sebanyak 77,8% responden peransertanya rendah. Sedangkan dari tingkat pengetahuan sedang dan tinggi, persentase responden lebih banyak dalam tingkat peranserta sedang.

Tabel 7. Sebaran Responden Berdasarkan Tingkat Peranserta

Kategori Tingkat Peranserta	Responden	
	Jumlah	%
Rendah	24	20.0
Sedang	89	74.2
Tinggi	7	5.8
Total	120	100.0

Sumber: Analisis Data Primer, 2009

Tabel 8. Hubungan Antara Pendidikan dengan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan TNGM

Tingkat Peranserta	Tingkat pendidikan									
	tidak sekolah	%	SD	%	SMP	%	SMA	%	Akademi /PT	%
Rendah	1	11,1	10	22,2	7	18,4	4	17,4	2	40,0
Sedang	8	88,9	34	75,6	28	73,7	16	69,6	3	60,0
Tinggi	0	0,0	1	2,2	3	7,9	3	13,0	0	0,0
	9	100,0	45	100,0	38	100,0	23	100,0	5	100,0

Sumber: Data Primer, 2009

Hasil analisis statistik menunjukkan ada hubungan antara variabel peranserta dengan pengetahuan dimana r (korelasi koefisien)=0,290 dan nilai signifikansi (p) =0.001, yang berarti p hitung < 0,05.

Dari hasil penelitian didapat bahwa responden dalam tingkat ekonomi yang rendah, sebanyak 76,1% dari 67 responden, tingkat peransertanya sedang. Sedangkan pada tingkat ekonomi sedang, sebanyak 70,8% dari 48 responden mempunyai tingkat peranserta yang sedang juga.

Tabel 9. Hubungan Antara Pengetahuan dengan Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan TNGM

Tingkat Peranserta	Tingkat Pengetahuan						Jumlah	%
	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%		
Rendah	7	77,8	9	17,0	8	13,8	24	20,0
Sedang	2	22,2	44	83,0	43	74,1	89	74,2
Tinggi	0	0,0	0	0,0	7	12,1	7	5,8
	9	100,0	53	100,0	58	100,0	120	100,0

Sumber: Data Primer, 2009

Tabel 10. Hubungan Tingkat Ekonomi dengan Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan TNGM

Tingkat Peranserta	Tingkat Ekonomi						Jumlah	%
	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%		
Rendah	10	21.3	12	20.3	2	14.3	24	9,2
Sedang	34	72.3	46	78.0	9	64.3	89	74,2
Tinggi	3	6.4	1	1.7	3	21.4	7	16.7
Total	47	100,0	59	100,0	14	100,0	120	100

Sumber: Data Primer, 2009

Tabel 10. Hubungan Antara Jarak Rumah Tinggal – TNGM dengan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan TNGM

Tingkat Peranserta	Jarak					
	dekat	%	sedang	%	jauh	%
Rendah	4	11,1	11	25,0	9	22,5
Sedang	29	80,6	31	70,5	29	72,5
Tinggi	3	8,3	2	4,5	2	5,0
total	36	100,0	44	100,0	40	100,0

Sumber: Data Primer, 2009

Jarak sebagai faktor eksternal akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Jarak disini merupakan jarak antara tempat tinggal responden dengan batas terluar dari taman nasional yang berbatasan langsung dengan batas desa. Melalui penelitian diperoleh data bahwa dalam jarak dekat, 80,6% dari 36 responden mempunyai tingkat peranserta yang sedang. Responden dengan jarak sedang, sekitar 70,5% dari 44 responden juga memiliki tingkat peranserta sedang. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa bagi sebagian responden, jarak yang relatif lebih jauh dari TNGM menjadikan alasan bagi mereka untuk tidak mengambil bagian kegiatan pengelolaan lingkungan TNGM, seskipun mereka menyadari ada ketergantungan mereka secara langsung terhadap sumber daya air yang bersumber dari kawasan TNGM.

Selanjutnya hubungan variabel dianalisis melalui uji statistik korelasi, menghasilkan r (korelasi koefisien)=-0.193, nilai probabilitas (p)=0.035 yang berarti p hitung lebih kecil daripada nilai signifikansi 0.05, berarti bahwa dengan jarak rumah tinggal yang semakin dekat dengan taman nasional maka peranserta masyarakat akan semakin tinggi.

Pengelolaan TNGM mengacu pada prinsip kolaborasi atau kemitraan yang saat ini di Indonesia telah ditetapkan suatu perundang-undangan yaitu melalui Peraturan Menteri No 19/2004 mengenai Pengelolaan Kolaboratif. Berdasarkan peraturan tersebut, kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi adalah suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektifitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Departemen Kehutanan, 2004). Pengelolaan sumber daya alam TNGM dan daerah penyangganya di masa mendatang adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya alam terpadu yang mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pengetahuan masyarakat secara komprehensif mengenai TNGM dalam kategori sedang – baik. Kondisi tersebut merupakan modal awal yang kuat bagi sebuah pengelolaan TNGM secara kolaboratif. Pengetahuan yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap persepsi masyarakat sehingga pemahaman dan persepsi masyarakat sekitar terhadap TNGM harus menjadi perhatian dalam pengelolaan lingkungan. Persepsi akan membentuk perilaku dan selanjutnya akan mempengaruhi peranserta mereka dalam pengelolaan taman nasional secara bersama. Peranserta berperan penting dalam strategi pengelolaan lingkungan taman nasional karena merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kebijakan dan pelaksanaan program perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi. Dalam rangka meningkatkan partisipasi atau peranserta masyarakat dapat dilakukan dengan membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan secara lestari dalam upaya mengembangkan rasa

memiliki sekaligus bertanggungjawab menjaga dan mempertahankan keutuhan kawasan taman nasional dengan segala fungsinya.

Kegiatan kemitraan yang telah dilakukan antara pihak Balai TNGM dan masyarakat Desa Umbulharjo, pada dasarnya merupakan langkah menuju pengelolaan kolaborasi yang lebih intensif. Saat ini kerjasama yang dilakukan masih sebatas kerjasama yang bersifat umum, belum menyentuh masyarakat secara luas dan mendalam untuk benar-benar dapat berperanserta dalam pengelolaan lingkungan taman nasional terutama bagi masyarakat itu sendiri yang bergantung banyak pada sumber daya hutan.

Pengelolaan TNGM secara terpadu juga memerlukan suatu bentukan organisasi atau komite lokal yang bersinergi kuat yang langsung dapat berperan sesuai dengan kompetensi dan saling melakukan koordinasi. Untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan baik dari pihak pemerintah dalam hal ini pihak Balai TNGM dan lembaga pemerintah lain yang terkait maupun dari masyarakat sekitar untuk mendukung pengelolaan taman nasional. Penguatan kelembagaan selain dari penguatan sumber daya manusianya juga harus disertai dengan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang segala aktivitas dalam rangka perlindungan dan pelestarian kawasan taman nasional.

KESIMPULAN

Pengetahuan masyarakat Desa Umbulharjo mengenai pengelolaan TNGM secara komprehensif mayoritas dalam kategori tinggi. Persepsi masyarakat mengenai pengelolaan TNGM mayoritas dalam kategori sedang. Persepsi masyarakat mengenai pengelolaan TNGM mempunyai hubungan positif pengetahuan masyarakat. Tingkat ekonomi dan jarak tempat tinggal responden dengan taman nasional tidak mempengaruhi tingkat persepsi mereka terhadap pengelolaan taman nasional. Peranserta masyarakat dalam pengelolaan TNGM mayoritas kategori sedang. Pengetahuan masyarakat dan jarak antara tempat tinggal responden dan TNGM mempunyai hubungan positif dengan tingkat peranserta. Peranserta tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat. TNGM telah diterima masyarakat sekitar baik secara konsep dan pengelolaannya namun peranserta masyarakat dalam kemitraan masih memerlukan peningkatan melalui sosialisasi yang jelas, kontinyu, dan transparan serta pelaksanaan program-program pembangunan lingkungan yang dapat dilakukan secara kemitraan dengan berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. 1993. *Sumberdaya Lokal untuk Masyarakat Lokal: Sebuah Impian*. KONPHALINDO. Jakarta.
- Alikodra, H.S., E. Subandino, S. Basuni, A. Kosasih, M. Ani, E.K.S Harini., 1983. *Rancangan Penelitian Pengembangan Buffer Zone Pelestarian Alam*. Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Bogor.
- Alikodra, H.S, 1987. *Manfaat Taman Nasional bagi Masyarakat Sekitarnya.. Pengaturan Sumber Daya Taman Nasional*. Media Konservasi: Vol I No 3.
- Anshari, Gusti Z, 2006. *Dapatkan Pengelolaan Kolaboratif Menyelamatkan Taman Nasional Danau Sentarum*. CIFOR. Bogor
- Arnstein, Sherry R. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. JAIP Vol 35. Available: www.kolaboratif.org, diunduh:17/04/2008.
- Awang, S.A, 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. CCSS-Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Azwar, S., 2003. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Edisi 2. Cetakan VII. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Borrini-Feyerabend, G (ed). 1997: *Beyond Fences: Seeking Social Sustainability in Conservation*. IUCN Gland Switzerland.
- De Young, R., 1999. Environmental Psychology. In D.E. Alexander and R.W. Fairbridge (Eds). *Encyclopedia of Environmental Science*. Kluwer Academic Publisher. Birmingham.
- Hardjasoemantri, Koesnadi., 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Haryanto dan Triwibowo, D., 1999. *Prospek Pengelolaan Bioregional dalam Otonomi Daerah*. Makalah pendukung dalam Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam Era Otonomi Daerah. Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.
- Hasanu Simon, 2004. *Membangun Kembali Hutan Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- IUCN-The World Conservation Union, 1997. *Resolution dan Recommendations: World Conservation Congress*. Canada.
- Tadjudin, D. 2000. *Manajemen Kolaborasi*. Pustaka Lembaga Alam Tropika Indonesia. Bogor.
- Koentjaraningrat, 1980. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. PT Gramedia . Jakarta.
- Mitchell, B., B. Setiawan., dan D.H. Rahmi., 2000. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nawawi, H., 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nugroho, Yuli., *Umbul Wadon dan Tragedi Pengelolaan Sumberdaya Milik Bersama*. www.damarnet.org/tragedi%20umbul%20wadon.doc, diunduh:23/03/2009.
- Ritohardoyo, S., 1995. *Bahan Ajar Ekologi Manusia*. Program Studi Ilmu Lingkungan. Program Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
- Santoso, Singgih., 2001. *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sarwono, S.W., 1992. *Psikologi Lingkungan*. Grasindo. Jakarta.
- Soekmadi, R., 1987. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pencari Kayu Bakar di Taman Nasional Baluran*. IPB. Bogor.
- Suharso, Ade. 2005. Perbandingan Analisis Proses Negosiasi Boundary Rule, Prosedur dan Substansi Pada Pembentukan Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Batang Gadis. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Suharjito, D. 2003. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Lokal dan Stakeholders Lain dalam Pembangunan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. *Makalah Seminar*. Pekan Ilmiah Kehutanan Nasional (PIKNAS) 7 September 2003. Bogor.
- Suporaharjo (ed)., 2005. *Manajemen Kolaborasi Memahami Pluralisme Membangun Konsensus*. Pustaka Latin. Bogor.

- Veitch, R and D.Arkkelin, 1995. *Environmental Psychology an Interdisiplinary Perspective*. A Simon and Schuster Company. New Jersey.
- Wardojo, Wahyudi, 2000, *Gugus Tugas Kelembagaan Kehutanan Dalam Rangka Desentralisasi*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.
- Wiratno, Daru Indriyo, Ahmad Saifudin dan Ani Kartikasari. *Berkaca di Cermin Retak, Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*. 2001. The Gibbon Foundation Indonesia.
- Wiyono, T., Putro, 2008. Pentingnya Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Jawa. *Makalah, Kursus Pengelolaan Hutan*. Deras Training Centre. Yogyakarta.
- _____, *Membangun Kembali Upaya Mengelola Kawasan Konservasi di Indonesia Melalui Manajemen Kolaboratif, Kerangka Kerja dan Panduan Implementasi*, 2002 Available: www.bappenas.go.id, diunduh:23/03/2009.
- _____, 2004. Laporan Akhir: Rencana Pengelolaan Calon Taman Nasional Gunung Merapi Periode 2005-2024. Kerjasama BKSDA Yogyakarta dan Pusat Studi Agroekologi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- _____, 2005. Laporan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat di dalam dan Sekitar Kawasan Hutan Konservasi (*Taman Nasional Gunung Merapi*). Departemen kehutanan: Badan Planologi Kehutanan Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan. Jakarta.
- _____, *Rencana Strategis (Renstra 2005-2009) Balai Taman Nasional Gunung Merapi*. Yogyakarta.
- _____, UU No 5/1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, UU No 41 tahun 1999 tentang *Kehutanan*, Departemen Kehutanan RI, Jakarta.
- _____, UU No 24/1992 tentang *Penataan Ruang*.
- _____, Peraturan Menteri Kehutanan No 19 tentang *Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Departemen Kehutanan, 2004. Jakarta.
- _____, Keputusan Menteri Kehutanan no: SK. 134/Menhut-II/2004 tentang *Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman*

Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Seluas Lebih Kurang 6.410 (Enam Ribu Empat Ratus Sepuluh) Hektar, yang Terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Taman Nasional Gunung Merapi. Departemen Kehutanan, 2004. Jakarta.